

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Marzuki Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Wiyono, R., *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Alumni, Jakarta, 1982.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Endroleksono Didik, Purwo, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.
- Endroleksono Didik, Purwo, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang, 2018.
- Robert K, Aris Irawan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019.
- Rahayu Muji, Kartika, Tojeng Muh. Affan, R., Syawawi, Reza, *Laporan Riset Sistem Perlindungan Terhadap Pelapor, Saksi Dan Korban Dalam Konteks Korupsi*, Transperency International Indonesia, 2017.
- Nurtjahjo, Hendra, dkk, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman RI, Jakarta, 2013.
- Utomo Nurrahman, Aji, Widiati Ekawestri, Prajwalita, *Menjejakkan Legislasi Berbasis HAM*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2016.
- Okta, Siradj, *Perlindungan Saksi Di Indonesia: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kedudukan Whistleblower*, Ditulis Dalam: *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.

### Jurnal

- Suprantio, Steven, *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial, 2014.
- Nugroho, Bastianto, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Jurnal Yuridika, 2017.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*; 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 294 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6250.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan LPSK No. 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor: 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp.

Putusan Nomor: 2165 K/Pid/2012

### **Laman Internet**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dcb3732cca3/arti-itestimonium-de-auditu-i/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b95dd1b43de8/bisakah-iwhistleblower-i-tipikor-dituntut-pencemaran-nama-baik>

<https://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/>

<https://lokataru.com/habis-manis-sepah-dibuang-cerita-nasib-buruk-yang-menimpa-roni-wijaya-sebagai-whistleblower-kasus-korupsi-proyek-hambalang/>